

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dengan baik dan professional, sebagaimana pemerintah daerah merupakan organisasi yang penting terhadap publik. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Prinsip tersebut hanya dapat terwujud apabila semua kegiatan yang dilakukan di lembaga pemerintahan didasarkan pada pertanggungjawaban perencanaan atas laporan keuangan yang dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, menginformasikan pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) dengan cara menerapkan suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kegiatan pemerintah tentunya juga sangat erat kaitannya dengan proses penganggaran. Proses penganggaran yang berdasarkan dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan anggaran memungkinkan adanya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap proses pembuatan anggaran yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan inefektivitas anggaran yang dibuat. Banyaknya penyimpangan atau kecurangan yang terjadi dalam kegiatan yang ada di pemerintahan, maka diperlukan pengendalian internal dan pemantauan internal yang tepat dengan tujuan untuk mengurangi risiko kecurangan yang dapat terjadi setiap saat. Ramandei (2009) menjelaskan dalam

disertainya bahwa SPI yang baik dapat mengatasi tingkat kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterbitkan mengacu pada konsep pengendalian internal yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* pada tahun 2013. Unsur-unsur tersebut terdiri dari lima komponen utama, “yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan” (COSO, 2013).

Penerapan SPI tidak hanya menjadi persyaratan hukum, tetapi penerapan SPI juga terkait erat dengan pemberian opini audit. Menurut Hasan (2013) penerapan SPI termasuk dalam salah satu faktor kunci sebagai penentu hasil opini audit dari BPK. Menurut Simanjuntak (2012) juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperbaiki kerangka kerjanya, yaitu penerapan SPI. Meskipun kenyataannya masih ada beberapa pemerintah daerah yang mengalami kesulitan untuk memperkenalkan SPI ke lingkungan pemerintahannya.

Penerapan SPI sebisa mungkin dimonitor dan dievaluasi supaya fungsi dari SPI tersebut berhasil, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. SPI memiliki fungsi untuk memastikan sepenuhnya efektivitas dan efisiensi proses akuntansi, terutama keandalan laporan keuangan tahunan (Maysaroh, 2018). SPI dibentuk untuk dapat memitigasi risiko (Wilford, 2016).

Pelaporan keuangan yang baik membutuhkan sistem operasi internal yang baik (Alwi et al., 2020). Selain pelaporan keuangan yang baik, Parkhurst (2017) berpendapat bahwa penerapan SPI juga berpengaruh terhadap penerapan good governance. SPI termasuk bagian penting dalam menilai kualitas laporan keuangan. Diharapkan dengan semakin banyaknya penelitian mengenai SPI, pemerintahan daerah terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperkuat SPI di setiap OPD sehingga mampu menyusun laporan keuangan yang wajar dan menyajikan laporan keuangan sehingga menghasilkan opini audit yang wajar.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai penerapan SPI. Damayanti (2020) menyatakan bahwa SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berjalan cukup baik karena secara keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan unsur SPIP. Noviani & Hendarsyah (2020) menemukan dalam penelitiannya, bahwa penerapan SPI berdampak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ristanti et al (2014) menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap penerapan good governance. Armel *et al* (2017), Kania (2021), dan (Lu et al., 2011) menyatakan bahwa “SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”.

Menurut Mahmudi (2007) dalam Aditya & Surjono (2017), penyusunan laporan keuangan melibatkan proses serta langkah-langkah sebagaimana diatur dalam SAP daerah yang telah diterapkan. SAP tersebut juga mengatur mengenai peraturan SPI. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan SPI berpengaruh terhadap tingginya kualitas laporan keuangan, maka akan lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh opini audit yang wajar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pelaporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah”. Penelitian ini bermaksud untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dikarenakan dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa SPI harus diterapkan pada berbagai kegiatan organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pelaporan keuangan memiliki komponen SPI. Komponen SPI tersebut dapat membantu dalam penyiapan laporan keuangan sehingga dapat dilaporkan secara tepat waktu untuk digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, dan laporan audit yang wajar dapat diperoleh dengan mudah.

Penelitian ini mengarah pada penerapan unsur-unsur yang terkait dengan SPI yang dikemukakan oleh COSO (2013). Unsur-unsur SPI tersebut meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan aktivitas pemantauan. Objek penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Sumenep yakni Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep.

Dasar dari dilakukannya penelitian ini dikarenakan melihat fenomena yang terjadi di daerah kabupaten Sumenep mengenai perolehan hasil opini audit atas laporan keuangan daerahnya yang sudah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut hasil laporan audit, pemerintah daerah kabupaten sumenep sempat memperoleh hasil opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima dari tahun 2008-2016. Salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh opini WDP dari BPK dikarenakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal (Ahmadi, 2017). Menurut

Putri et al (2021) hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya peran sumber daya manusia serta masih lemahnya pengendalian internal lembaga pemerintah daerah. Lemahnya pengawasan keuangan daerah tentunya juga dapat mempengaruhi terhadap hasil pengelolaan keuangan yang sehat, akurat dan baik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep setelah 8 tahun berturut-turut memperoleh opini WDP, namun sudah mengalami peningkatan yakni dari tahun 2017-2021 sudah memperoleh opini WTP. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan meskipun sudah memperoleh opini audit WTP akan tetapi masih memiliki kelemahan dalam penerapan pengendalian internalnya yakni di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

BPPKAD Kabupaten Sumenep merupakan lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas membantu bupati dalam Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset. BPPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (Peraturan Bupati Sumenep, 2018). Fungsi dari BPPKAD sendiri yakni untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah serta pelaporan hasil laporan keuangan daerah. BPPKAD memiliki fungsi sebagai entitas pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai entitas pelaporan keuangan daerah. Sementara untuk INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep sendiri merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah Kabupaten Sumenep. INSPEKTORAT juga memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Penerapan SPI di BPPKAD maupun di INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep sudah diterapkan di setiap bagian divisi yang ada di Instansi. Penerapan SPI tersebut masih memiliki kelemahan. Kelemahan yang terdapat dalam penerapan SPI yakni terletak pada sumber daya manusia (SDM), SDM memiliki peran penting dalam penerapan SPI yang baik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan SPI di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep yang merujuk pada COSO (2013). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara guna memperoleh berbagai informasi tentang penerapan SPI di BPPKAD dan INSPEKTORAT kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep sesuai dengan unsur-unsur COSO (2013)?
2. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari penerapan sistem pengendalian internal di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan Sistem Pengendalian Internal di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep dengan unsur-unsur COSO (2013) dalam pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan dari penerapan sistem pengendalian internal di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian penerapan SPI di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep yang merujuk pada unsur COSO serta kelebihan dan kelemahan dari penerapan SPI tersebut.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai bentuk sumber referensi dan sebagai bahan masukan kepada peneliti sehubungan dengan penerapan SPI didalam suatu organisasi.

3. Bagi Instansi

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk badan pemerintahan dalam meningkatkan SPI dikemudian hari agar berguna untuk pengelolaan keuangan bahkan pelaporan keuangan di BPPKAD dan INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep.